



RENCANA KERJA

RENJA PERUBAHAN

2025

INSPEKTORAT

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 telah selesai disusun yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : 'Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4"

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Perubahan rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, besar harapan kami agar perubahan RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin

Sekayu, 28 Juni 2025
Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



SYAILENDRA, SE
PEMBINA TK.I
NIP.19670711 199803 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI TRIWULAN II	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Muba sampai Triwulan II	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	8
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal P-RKPD	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KAB.MUBA	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab.Muba	19
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KAB.MUBA	58
4.1 Rencana Program dan Kegiatan	28
4,2 Pendanaan Indikatif	33
BAB VIII PENUTUP.....	37

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang memuat Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Penyusunan Renja mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program Prioritas pembangunan daerah. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembamgunan Jangka Menengah Daerah, dan dalam pasal 351 ayat (2) menjelaskan bahwa Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, meliputi :

- a) Rancangan Perubahan RKPD:
- b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

Perubahan RENJA Perangkat Daerah, memuat penjabaran Program , Kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan RENJA Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab secara efisien dan efektif sehingga fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, keberadaan dan eksistensi benar-

benar dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam mewujudkan ***good and clean governance***.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 285).
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupate Musi Banyuasin Tahun 2024, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi lokasi sumberdaya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Muba sampai Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal P- RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 3.2 Pendanaan Indikatif

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI TRIWULAN II

2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Muba Sampai Triwulan II

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi Peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan. Sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Pagu anggaran	: Rp. 25.405.988.673
Realisasi Anggaran	: Rp. 10.471.244.327
Persentase	: 41,22 %

Adapun secara rincian capaian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juli 2025 diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota			
	• 8 Kegiatan • 23 Subkegiatan	Rp. 20.815.202.823	Rp 8.906.236.698	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan			
	• 2 Kegiatan • 7 Subkegiatan	Rp. 3.273.767.950	Rp. 1.202.553.809	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
	• 2 Kegiatan • 5 Subkegiatan	Rp. 1.317.017.900	Rp. 362.453.820	

Berikut Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juli Tahun 2025 yang masih dibawah 50% yaitu :

No.	Uraian Program/Kegiatan	% Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35,67
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	27,64
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,52

2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
	1. Penyelenggara Pengawasan Internal	28,13
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	
	1. Pendampingan dan Asistensi	23,12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Sistem Pengawasan Internal berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang Berbasis Risiko (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Ruang lingkup PKPT terdiri dari Consulting dan Assurance yakni Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring/Pemantauan dan Pengawasan lainnya.

Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Non PKPT yang terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP, BPK Ri dan koordinasi pengawasan secara komprehensif.

Khusus untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai saat ini belum ada indikator kinerja yang sudah dalam standar pelayanan minimal maupun IKK, oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menentukan tolak ukur kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Inspektorat secara umum yang merujuk pada Kementerian PAN dan RB, BPKP maupun APIP lainnya.

Analisis capaian kinerja pelayanan Insektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catata Analisis
				2022	2023	2024	2025		2023	2024	
				n-2	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase PD yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B	%		90							
2	Opini terhadap Laporan Keuangan PEMDA	Predikat		WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	%		80	80	83	85	90,73	89,84		
4	Leveling Kapabilitas APIP	Level		3	3	3	3	2+	2+		
5	Skor Maturitas SPIP	Skor		3,00	3,15	3,20	3,25	2	2		
6	Skor Penilaian Reformasi dan Birokrasi Pemda	Skor		B	CC	B	B	CC	B		
7	Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Nilai		4							
8	Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	%			67%	70%	75%		70,2 %		
9	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%			85%	87%	89%		100 %		
10	Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)	%			40%	50%	60%		68,4 %		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Perubahan sistem manajemen Pemerintahan Daerah dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku APIP. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya sistem pengawasan intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah secara menyeluruh untuk

mewujudkan Tata kelola Keuangan Daerah berdasarkan prinsip Good Governance.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dalam jangka panjang bagi keseimbangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat.
2. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi Informasi di lingkungan kerja
4. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP
5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap Visi dan Misi Bupati Musi Banyuasin.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal P-RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel 2.4 di bawah ini :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL P-RKPD TAHUN 2025
INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (%)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32.759.760.415					32.759.760.415	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.759.760.415					32.759.760.415	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan	100 %	90.771.300	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan	100 %	90.771.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.601.450	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.601.450	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.999.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.999.900	
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Data Statistik Sektorl Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	29.169.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Data	29.169.950	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	23.999.823.219	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	23.999.823.219	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang	23.999.823.219	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang	23.999.823.219	
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	89.316.500	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	89.316.500	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	89.316.500	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	89.316.500	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	581.971.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	581.971.000	

5	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket		Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepagawaian	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepagawaian	50 Dokumen	48.387.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepagawaian	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepagawaian	50 Dokumen	48.387.000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	533.584.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	533.584.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase pengelolaan Administrasi Umum	100 %	945.756.970	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase pengelolaan Administrasi Umum	100 %	945.756.970
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.867.180	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.867.180
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	118.439.340	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	118.439.340
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	54.725.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	54.725.900
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	100.633.452	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	100.633.452
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	128.741.098	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	128.741.098
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	
14	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000
15	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.776.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.776.000

16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	429.574.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	429.574.000	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	614.550.800	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	614.550.800	
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	354.720.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	354.720.000	
18	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	259.830.800	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	259.830.800	
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	920.289.856	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	920.289.856	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	282.199.012	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	282.199.012	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	638.090.844	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	638.090.844	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.010.700.320	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.010.700.320	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	488.910.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	488.910.000	

23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.624.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.624.000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	323.166.320	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	323.166.320
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.157.755.950			3.157.755.950
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	2.342.915.500	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	2.342.915.500
25	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43 Laporan	655.441.400	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43 Laporan	655.441.400
26	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Laporan	524.718.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Laporan	524.718.500
27	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Musi Banyuasin, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	310.357.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	310.357.000
28	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Musi Banyuasin, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	91.866.950	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	91.866.950
29	Pengawasan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75 Laporan	558.352.750	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75 Laporan	558.352.750
30	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Kab. Musi Banyuasin, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 Dokumen	202.178.900	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 Dokumen	202.178.900
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	100 %	814.840.450	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	100 %	814.840.450
31	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Musi Banyuasin, Sernua Kecamatan, Sernua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 Laporan	814.840.450	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 Laporan	814.840.450

	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.348.824.500	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI		100 %	152.723.950	100 %	152.723.950	1.348.824.500	
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI			100 %	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan fasilitasi pengawasan							
32	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	2	152.723.950	Rekomendasi	152.723.950		
33	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	0		Rekomendasi	0		
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			100 %	Persentase Pendampingan dan Asistensi Pengawasan			1.196.100.550	100 %	1.196.100.550		
34	Pendampingan, Asistensi, Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	48 PD	263.930.000	48 PD	263.930.000		
35	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	48 PD	347.119.900	48 PD	347.119.900		
36	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	4 Kegiatan	490.000.000	4 Kegiatan	490.000.000		
37	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	48 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	48 PD	95.050.650	48 PD	95.050.650		
			TOTAL BELANJA PD :		TOTAL BELANJA PD :			32.759.760.415		32.759.760.415		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

a. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Inspektorat Jenderal selaku internal auditor kedepannya akan berperan sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. Sebagai *Quality Assurance* Inspektorat Jenderal Kemendagri berperan dalam memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan serta mendukung dalam mengambil kebijakan, sedangkan sebagai *Consulting* Inspektorat Jenderal ke depannya berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumberdaya (*resources*). Peran tersebut merupakan sebagai bagian dari refleksi Visi yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kemendagri tahun 2023 - 2026, yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan”

Untuk mewujudkan Visi, Inspektorat Jenderal Dalam Negeri merumuskan Misi sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi Memperkuat implementasi ideologi Pancasila ideologi Pancasila untuk menjaga untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri .
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan

pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Pernyataan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan perencanaan baik dituangkan pada Renstra maupun Renja Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu :

1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
3. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

b. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, yaitu :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

	Visi : Sumsel Maju Untuk Semua			
	Misi 3 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional, dan responsive.			
Tujuan	Sasaran Antara	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	Menurunnya penyalahgunaan Wewenang pada Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan sistem tata kerja yang transparan dan akuntabel	Pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.
		Meningkatnya sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik	Penataan eektifitas pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP berbasis risiko	Evaluasi Penerapan pengembangan SPIP oleh SKPD pada level berkembang
Meningkatkan Kualitas Sistem Integritas	Meningkatkan Kualitas Sistem	Terwujudnya Penegakan Integritas	Membangun dan mengimplementasikan sistem	Membangun percontohan zona integritas pada tingkat

Renja Inspektorat merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam renja ini harus sejalan dengan Renstra Inspektorat serta Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2023 – 2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Disamping itu, peran Inspektorat pada indikator Bidang Pemerintahan yaitu pada pernyataan Misi 1, **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.**

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2023-2026, yaitu:

a. Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.

b. Sasaran

Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian urusan pemerintahan daerah.

1. Meningkatnya kualitas pengawasan pelayanan publik;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan keuangan instansi pemerintah.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA tahun 2024, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Quality Assurance dan Consulting bagi Bupati Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran terdapat 8 Indikator yaitu :

1. Persentase PD tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (Zona Hijau);
2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;

3. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB;
4. Opini terhadap laporan keuangan PEMDA;
5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti;
6. Nilai kapabilitas APIP;
7. Nilai maturitas SPIP;
8. Nilai reformasi dan birokrasi PEMDA.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.	Meningkatnya kualitas pengawasan pelayanan publik	Persentase PD tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (Zona Hijau)	60%
			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	89%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan keuangan instansi pemerintah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	75%
			Opini terhadap laporan keuangan PEMDA	WTP
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	90%
			Nilai kapabilitas APIP	3
			Nilai maturitas SPIP	3,25
			Nilai reformasi dan birokrasi PEMDA	B

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai Berikut:

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan PD	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan Asistensi PD	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026												
Tahun Perencanaan : 2025												
Nama Perangkat Daerah		Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan										
		(4.00.01.01) INSPEKTORAT										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana				
				Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Jumlah Pagu (Rp)		Target Capaian Kinerja	Jumlah Pagu (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 01 01	UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					32.759.760.415			33.860.450.000			
6 01 01	INSPEKTORAT DAERAH					32.759.760.415			33.860.450.000			
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.253.179.965			24.860.000.000			
6 01 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan		100 %		90.771.300			100.000.000			
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	4 Dokumen	APBD KAB	51.601.450			4 Dokumen		50.000.000	
6 01 01 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	4 Laporan	APBD KAB	9.999.900			4 Laporan		50.000.000	
6 01 01 2.01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	1 Data	APBD KAB	29.169.950			1 Data		0	
6 01 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		100 %		23.999.823.219			100 %		18.000.000.000	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	136 Orang	APBD KAB	23.999.823.219			136 Orang		18.000.000.000	
6 01 01 2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %		89.316.500			100 %		100.000.000	
6 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	12 Dokumen	APBD KAB	89.316.500			12 Dokumen		100.000.000	

6 01 01 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian		100 %		581.971.000		100 %	1.015.000.000
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	0 Paket	APBD KAB	0		2 Paket	200.000.000
6 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	50 Dokumen	APBD KAB	48.387.000		50 Dokumen	65.000.000
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 Orang	APBD KAB	533.584.000		58 Orang	750.000.000
6 01 01 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Administrasi Umum		100 %		945.756.970		100 %	1.850.000.000
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	1 Paket	APBD KAB	24.867.180		1 Paket	40.000.000
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	APBD KAB	118.439.340		4 Paket	700.000.000
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	21 Paket	APBD KAB	54.725.900		21 Paket	60.000.000
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	43 Paket	APBD KAB	100.633.452		38 Paket	210.000.000
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	17 Paket	APBD KAB	128.741.098		16 Paket	275.000.000
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	0	APBD KAB	0		0 Dokumen	-
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	1 Paket	APBD KAB	40.000.000		1 Paket	55.000.000
6 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	12 Laporan	APBD KAB	48.775.000		12 Laporan	60.000.000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	APBD KAB	429.574.000		3 Laporan	450.000.000

6 01 01 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %		614.550.800		100 %	1.850.000.000
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	APBD KAB	354.720.000		4 Unit	800.000.000
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	APBD KAB	259.830.800		12 Paket	550.000.000
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	0	APBD KAB	0		1 Unit	500.000.000
6 01 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		920.289.856		100 %	1.015.000.000
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	3 Laporan	APBD KAB	282.199.012		3 Laporan	315.000.000
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	12 Laporan	APBD KAB	638.090.844		12 Laporan	700.000.000
6 01 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		1.010.700.320		100 %	930.000.000
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	12 Unit	APBD KAB	488.910.000		12 Unit	550.000.000
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	1 Unit	APBD KAB	198.624.000		2 Unit	300.000.000
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	29 Unit	APBD KAB	323.166.320		29 Unit	80.000.000

6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
6	01	02	2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100 %		3.157.755.950		100 %					5.950.000.000
6	01	02	2.01	01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Laporan	APBD KAB	655.441.400		43 Laporan					1.500.000.000
6	01	02	2.01	02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Laporan	APBD KAB	524.718.500		41 Laporan					1.000.000.000
6	01	02	2.01	03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	APBD KAB	310.357.000		3 Laporan					500.000.000
6	01	02	2.01	04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	APBD KAB	91.865.950		1 Laporan					150.000.000
6	01	02	2.01	05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Laporan	APBD KAB	558.352.750		75 Laporan					1.100.000.000

6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	APBD KAB	202.178.900		2 Dokumen	300.000.000
6 01 02 2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu		100 %		814.840.450		100 %	1.400.000.000
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 Laporan	APBD KAB	814.840.450		54 Laporan	1.400.000.000
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.348.824.500			3.050.450.000
6 01 03 2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan fasilitasi pengawasan		100 %		152.723.950		100 %	400.450.000
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	2 Rekomendasi	APBD KAB	152.723.950		2 Rekomendasi	350.000.000
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	0 Rekomendasi	APBD KAB			1 Rekomendasi	50.450.000
6 01 03 2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi Pengawasan		100 %		1.196.100.550		100 %	2.650.000.000
6 01 03 2.02 01	Pendampingan, Asistensi, Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 PD	APBD KAB	263.930.000		48 PD	600.000.000
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 PD	APBD KAB	347.119.900		48 PD	850.000.000
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	APBD KAB	490.000.000		4 Kegiatan	900.000.000

6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 PD	APBD KAB	95.050.650	48 PD	300.000.000
						TOTAL BELANJA PD :				32.759.760.415		33.860.450.000

Plt. Inspektur
 Kabupaten Musi Banyuasin

 SYAILENDRA, S.E
 Pembina TK. I
 NIP. 19680711 199803 1 006

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan tahun 2025 berisi program kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) subkegiatan. Terdapat perubahan/pergeseran anggaran untuk program, kegiatan dan Subkegiatan tahun 2025, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total semula Rp.20.815.202.823 menjadi **Rp. 28.253.179.965**
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan total semula Rp. 3.273.767.950,- menjadi **Rp. 3.157.755.950,-**
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Total semula Rp. 1.317.017.900 menjadi **Rp. 1.348.824.500,-**

Adapun Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dituangkan ke dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	202.178.900	2 Dokumen	300.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	02	2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	100 %	814.840.450	100 %	1.400.000.000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 Laporan	814.840.450	54 Laporan	1.400.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.348.824.500		3.050.450.000	
6	01	03	2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Persentase perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan	100 %	152.723.950	100 %	400.450.000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	152.723.950	2 Rekomendasi	350.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	0	1 Rekomendasi	50.450.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	03	2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	100 %	1.196.100.550	100 %	2.650.000.000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan, Asistensi, Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 PD	263.930.000	48 PD	600.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 PD	347.119.900	48 PD	850.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	490.000.000	4 Kegiatan	900.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 PD	95.050.650	48 PD	300.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	500.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6 01 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.015.000.000	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	315.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	700.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6 01 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	930.000.000	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	12 Unit	12 Unit	550.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	300.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	29 Unit	80.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.950.000.000	
6 01 02 2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	4.550.000.000	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43 Laporan	43 Laporan	1.500.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Laporan	41 Laporan	1.000.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	500.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75 Laporan	75 Laporan	1.100.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	48.387.000	50 Dokumen	65.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	533.584.000	58 Orang	750.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Administrasi Umum	100 %	945.756.970	100 %	1.850.000.000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.867.180	1 Paket	40.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	118.439.340	4 Paket	700.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	54.725.900	21 Paket	60.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	100.633.452	38 Paket	210.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	128.741.098	16 Paket	275.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	0 Dokumen	-	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	1 Paket	55.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.776.000	12 Laporan	60.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	429.574.000	3 Laporan	450.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	614.550.800	100 %	1.850.000.000	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	354.720.000	4 Unit	800.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	259.830.800	12 Paket	550.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

		TABEL 4.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN									
		Tahun Perencanaan : 2025									
Nama Perangkat Daerah		INSPEKTORAT DAERAH									
		Rekapitulasi Hasil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan									
Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Lokasi Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja	(Rp)		Target Capaian Kinerja	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
6 01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			32.759.760.415			33.860.450.000				
6 01	INSPEKTORAT DAERAH			32.759.760.415			33.860.450.000				
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28.253.179.965			24.860.000.000				
6 01 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan	100 %	90.771.300			100.000.000				
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.601.450			50.000.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
6 01 01 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.999.900			50.000.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
6 01 01 2.01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	29.169.950			0		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
6 01 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	23.999.823.219			18.000.000.000				
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang	23.999.823.219			18.000.000.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
6 01 01 2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	89.316.500			100.000.000				
6 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	89.316.500			100.000.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
6 01 01 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	581.971.000			1.015.000.000				
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0			200.000.000		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		

4.2 Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal jika tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Perubahan program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Menjadi (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.815.202.823	28.253.179.965
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.771.300	90.771.300
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.601.450	51.601.450
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	9.999.900	9.999.900
1.1.3	Pelaksanaan Pengumpulan Data StatistikSektoral	29.169.950	29.169.950
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.782.068.797	17.782.068.797
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.782.068.797	17.782.068.797
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.316.500	89.316.500
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.316.500	89.316.500
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256.971.000	581.971.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0

1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.387.000	48.387.000
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.584.000	533.584.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.756.970	945.756.970
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.867.180	24.867.180
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.439.340	118.439.340
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.725.900	54.725.900
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.633.452	100.633.452
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	128.741.098	128.741.098
1.5.6	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	40.000.000
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.776.000	48.776.000
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.574.000	429.574.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.550.800	614.550.800
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.720.000	354.720.000
1.6.2	Pengadaan Mebel	59.830.800	259.830.800
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.843.456	920.289.856
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.199.012	282.199.012
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.644.444	638.090.844
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.924.000	1.010.700.320
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.910.000	488.910.000
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.624.000	198.624.000

1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.390.000	323.166.320
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASA	3.273.767.950	3.157.755.950
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.458.927.500	2.342.915.500
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	655.441.400	655.441.400
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	524.718.500	524.718.500
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	310.357.000	310.357.000
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	91.866.950	91.866.950
2.1.5	Pengawasan Desa	1.000.900.800	830.900.800
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa APIP	202.178.900	202.178.900
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	814.840.450	814.840.450
2.2.1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	814.840.450	814.840.450
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.317.017.900	1.348.824.500
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	152.723.950	152.723.950
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	152.723.950	152.723.950
3.2	Pendampingan dan Asistensi	1.164.293.950	1.196.100.550
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	252.918.000	263.930.000
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	347.119.900	347.119.900
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	469.205.400	490.000.000
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	125.001.300	95.050.650

Tabel
Rancangan Akhir

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan Pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintahan, selain itu alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawasan dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengalami peningkatan.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin LK. I No 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN Telp. (0714) 321035 Fax. (0714) 322535
<http://inspektorat.mubakab.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 424 /KPTS-ITDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

INSPEKTUR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di perangkat daerah maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah.
- b. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam Rentan waktu 1 (satu) tahun perlu adanya perubahan Rencana kerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2025;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan perubahan Rencana kerja tahun 2025 pada Inspektorat Daerah dengan keputusan Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2)
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, Nomor 285)
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Peraturan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- KETIGA : Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 28 Juni 2025

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


SYAILENDRA, SE
PEMBINA TK.I
NIP 19670711 199803 1 006